

## BAB III

### PENGARUH ANTI SLAVERY INTERNASIONAL DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN DOMESTIK INGGRIS

Keterlibatan *Anti Slavery International* yang memengaruhi kebijakan Inggris untuk meningkatkan perlindungan kepada korban perbudakan dapat dikatakan berhasil membuat pemerintah mengambil tindakan tegas untuk melindungi para korban perbudakan, menghukum para pelaku dan mengupayakan penghentian sistem perbudakan melalui rantai pasokan. Sebagaimana keaktifan *Anti Slavery International* dalam mewujudkan tujuannya yang tidak berhenti pada sebatas pemerintah merespon tuntutan tersebut, tetapi menginginkan pembaharuan secara berkala guna meningkatkan kredibilitas Inggris dalam menangani masalah ini. Seperti yang dijelaskan pada BAB II mengenai *Two Faces of Power* yang mendeskripsikan kekuatan (power) tidak hanya sebatas pada sifat material tapi juga terdapat pada kemampuan bernegosiasi, mobilisasi dan mengumpulkan masa. Kemudian, *Pressure Group* yang menempatkan *Anti Slavery Internasional* sebagai penekan pemerintah memberantas perbudakan modern di Inggris. Maka dalam hal ini terdapat power dan tekanan pada program *Anti Slavery International*.

Bab ini akan menjelaskan power dan tekanan yang dilakukan oleh *Anti Slavery International* dalam proyek memberantas perbudakan modern. Adapaun teori yang penulis gunakan untuk menganalisa tindakan tersebut yaitu *Two Faces of Power* dan *Pressure Group*.

### **3.1 Hal-Hal Yang Memicu Anti Slavery International Untuk Terlibat Dalam Perubahan Kebijakan**

#### **3.1.1 Respon Pemerintah Inggris Dalam Menekan Kasus Perbudakan Modern**

Inggris adalah satu dari 10 negara maju yang sangat aktif menangani kasus perbudakan modern menurut *Global Slavery Index* sejak tahun 2016 (Global Slavery Index, 2018). Perbudakan modern melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di bidang sosial, politik, ekonomi dan wilayah geografi Inggris. Inggris bukan hanya sebagai tempat tujuan, tetapi juga tempat transit sehingga jaringan antar pelaku menjadi sangat luas didalam maupun diluar Inggris. Secara umum eksploitasi di Inggris dapat digambarkan dengan pengurangan upah dari majikan, kegagalan membayar hutang oleh korban, jam kerja yang panjang, kurangnya istirahat atau libur, pelayanan kesehatan dan keselamatan yang buruk selama bekerja, penyitaan dokumen korban secara paksa dan pemecatan tenaga kerja secara sepihak.

Hal tersebut mendorong Inggris secara terbuka berkomitmen untuk memerangi perbudakan modern dengan mengalokasikan dana untuk inspeksi tenaga kerja yang berasal dari tinjauan belanja pemerintah tahun 2010. Pemerintah Inggris telah mengambil tindakan untuk menuntut para pelaku dengan segala bentuk kriminalisasinya, dimana dalam *Sexual Offences Act 2003*, *Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc) Act 2004* atau setidaknya pemerintah ingin melindungi korban yang kabur dari kasus perdagangan manusia dan mencegah korban agar tidak ditangkap oleh pihak yang berwenang. Hal ini karena korban akan dipindah dari Inggris sebagai imigran gelap dimana korban akan dimintai pertanggungjawabansebagai resikonya.

Menindaklanjuti tindakan tersebut, sejak tahun 2002 serangkaian undang-undang dibuat dan disahkan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Dan sejak tahun 2004 pemerintah Inggris menganggap semua bentuk

perdagangan orang adalah ilegal dan pelakunya akan menerima hukuman hingga 14 tahun penjara. Perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi korban dari perdagangan manusia di Inggris semakin kuat setelah Ratu Inggris menyampaikan pidato bahwa aset berharga dan uang tunai dari hasil perdagangan manusia akan disita oleh pemerintah. Namun kebijakan dan respon terhadap kasus ini masih mendapat kritikan, sebab *Trade Union Congress* prihatin dengan keseriusan Inggris yang belum menegakkan hak-hak kerja para korban perdagangan manusia. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan banyak pihak terhadap kinerja pemerintah Inggris menilai pemerintah terlihat lebih peduli dengan pelaksanaan dan penangkapan pelaku perdagangan dengan pihak kepolisian, imigrasi dan penegak hukum daripada memenuhi kebutuhan dan hak korban secara penuh. Dalam melihat kasus perdagangan manusia peninjauan Inggris dirasakan lebih mengarah pada masalah migrasi daripada sebagai masalah HAM. Untuk itu, peninjauan ulang dinilai penting untuk dilakukan.

Disisi lain, Dewan Uni Eropa mengembangkan instrument hukum yang berisi tentang perdagangan manusia. Strategi utama dimulai dari membentuk definisi, mencirikan tindakan umum, kerangka kerja metodologis dan tindakan pencegahan, bantuan dan perlindungan terhadap korban, kerjasama dengan komisi peradilan dan koordinasi, kemudian yang terakhir puncaknya ratifikasi konvensi yang menentang tindakan perdagangan manusia. Dalam proses pembahasan masalah perdagangan manusia ada hal yang diperdebatkan, yaitu harus dimasukkan dalam kategori apa masalah perbudakan apakah migrasi atau HAM agar ditemukan cara yang tepat untuk melindungi korban yang berasal dari luar Inggris. Pada awal proses tersebut Dewan Uni Eropa belum menjadikan HAM sebagai fokus dalam perdagangan manusia. Upaya memberantas perdagangan manusia juga dilakukan oleh Komisi Eropa dengan membuat strategi diikuti oleh Uni Eropa yang menyusun aksi memberantas perdagangan

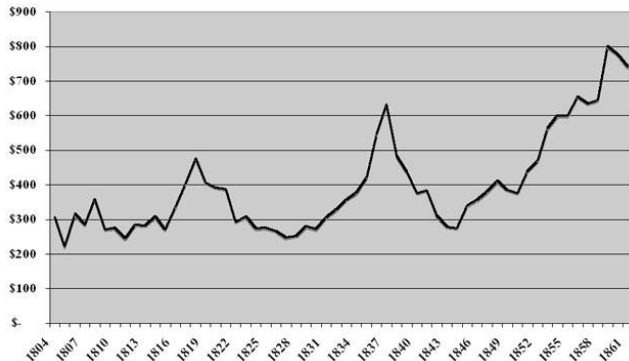
manusia dengan ditetapkan peraturan yang wajib dipatuhi oleh negara-negara Eropa.

Berdasarkan laporan Inggris kepada *Human Right Committee* pada April 2015 yang memeriksa Inggris dalam kepatuhannya dengan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*, Inggris menanggapi sekaligus menjelaskan Rancangan Undang-Undang tentang perbudakan modern dan membentuk *Anti Slavery Commissioner* (Komisaris Anti-Perbudakan) yang independen untuk mendorong perbaikan dan merespon ketetapan hukum yang lebih terkoordinasi terhadap perbudakan modern dan bekerja untuk kepentingan para korban perbudakan. *Anti Slavery Commissioner* bertugas untuk mendorong pencegahan, mendeteksi, investigasi dan penentuan pelanggaran kasus perbudakan modern serta mengidentifikasi korban. *Anti Slavery Commissioner* melaporkan investigasi penelitian dan tugasnya kepada *UK Parliament*. Mereka juga melakukan kerja sama dengan *Gangmaster Licensing Authority* (Otoritas Perizinan Gengmaster) dan *Children's Commissioners* untuk Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara. Otoritas lembaga pemerintah yang berkompeten untuk membuat keputusan tentang individu yang dirujuk sebagai korban perbudakan modern adalah *NCA's Modern Slavery Human Trafficking Uni* (NCA MSHTU), yang menangani kasus korban perbudakan yang berasal dari *European Economic Area (EEA)* dan mengurus kasus nasional non-EEA adalah *UK Visa and Immigration* di *Home Office*.

*Home Office* adalah pengelola urusan imigrasi dan proses identifikasi korba untuk warga non-Eropa, sedangkan kasus perbudakan modern di Uni Eropa ditangani oleh *National Crime Agency (NCA)*. NCA mengeluarkan jumlah orang yang resmi dirujuk ke sistem perlindungan Inggris untuk mengklaim kejadian kasus perbudakan modern yang diamalinya. Sebanyak 5.145 calon korban atau baru 10% yang berhasil diakui. Untuk warga non-Eropa mengalami penurunan jumlah korban perbudakan modern yaitu sekitar 3%.

Kekhawatiran muncul bagi mereka yang gagal diakui sebagai korban perbudakan dimana mereka semakin kehilangan dukungan yang selanjutnya akan membuat beberapa orang yang tidak punya tempat tinggal dan rentan menjadi perdagangan kembali bertambah jumlahnya. Dan ini merupakan pintu lain yang terbuka bagi para pelaku eksploitasi.

### Grafik Garis 1 Nilai perbudakan



Sumber :Samuel H. Williamson **Invalid source specified**. Measuring Slavery in 2016

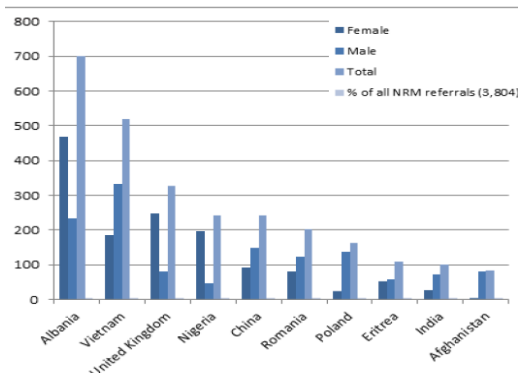
Dollars\*

Diketahui bahwa Nilai perbudakan jenis baru bahwa budak saat ini lebih murah daripada harga budak sebelumnya. Harga budak pertanian di Albania pada tahun 1850 sebesar \$1000, sedangkan pada tahun 2001 harga seorang budak dapat dibeli dengan harga \$100. Walaupun begitu, harga budak yang turun sejak tahun 1950 keuntungan yang didapat oleh para pelaku masih dikatakan besar dan nilai budak global diperkirakan sebesar \$12,3 miliar per tahun. Budak masa lalu menjadi mahal karena mereka dijadikan alat investasi berbeda dengan nilai budak saat ini yang hanya “digunakan” sekali pakai oleh perusahaan.

Dan ILO juga memperkirakan bahwa nilai perdagangan manusia yang terjadi di seluruh dunia ± \$32

miliar per tahun dan hampir setengah dari jumlah tersebut yaitu sekitar \$15,5 miliar per tahun adalah nilai dagang manusia ke negara industri. Angka perdagangan sulit diukur secara tepat dalam kualitatif disebabkan oleh sebagian besar para korban perdagangan manusia untuk eksploitasi dan illegal adalah jumlah manusia yang tersembunyi, jadi sulit dilakukan sampel dan membuat representasinya dan apabila penelitian lebih banyak dipastikan jumlah yang sebenarnya akan semakin terbuka.

### Grafik Batang 1 Asal negara korban perbudakan



Sumber :HM Government *Invalid source specified*. 2017 UK Annual Report on Modern Slavery

Menurut grafik batang 1 *National Crime Agency* negara mayoritas korban perbudakan modern berasal dari negara Albania, Vietnam, Nigeria, Inggris dan kemudian Romanida. Pada tahun 2017 asal calon korban berasal dari 116 negara, dimana negara yang paling banyak dilaporkan adalah Albania 19% dan calon korban yang dieksploitasi anak-anak Inggris adalah 32%. Rujukan status korban perbudakan yang merupakan warga negara Inggris meningkat 151% atau sekitar 326 – 819 orang pada tahun 2016. Negara lainnya yang menyusul yaitu Cina, Nigeria dan Eritrea. Namun, dari tahun

2015 – 2017 asal negara calon korban tetap sama secara luas **Invalid source specified**. Mereka juga diajak dengan tawaran kekayaan. Dan pada tahun 2016 total perbudakan modern di seluruh dunia diperkirakan mencapai 45,8 juta orang menurut *Global Slavery Index* (Business & Human Rights Resource Centre, 2016).

**Tabel 1 daftar negara mayoritas asal perbudakan**

Claimed Nationality	Domestic Servitude	Labour Exploitation	Organ Harvesting	Sexual Exploitation	Unknown Exploitation	Total 2017	Change over 2016	Total 2016
United Kingdom	12	393	0	394	21	820		326
Albania	11	223	0	486	57	777		699
Vietnam	40	429	2	107	161	739		519
China	7	131	1	140	14	293		241
Nigeria	86	23	0	133	22	264		243
Romania	11	176	0	63	9	259		202
Sudan	7	199	0	3	28	237		79
Eritrea	26	103	0	21	39	189		109
India	25	90	0	18	7	140		100
Poland	2	83	0	11	6	102		163
Pakistan	38	32	0	20	7	97		70
Ethiopia	23	40	0	7	14	84		41
Afghanistan	13	30	0	13	24	80		83
Iran	6	30	0	13	22	71		39
Iran	8	19	0	19	18	64		60
Slovakia	1	46	0	2	8	64		73
Bangladesh	19	26	0	7	5	57		54
Philippines	38	7	0	6	3	54		45

Sumber : National Crime Agency **Invalid source specified**. National Referral Mechanism Statistics – End of Year Summary 2017

Pada tahun 2017 menurut tabel 1 daftar negara asal perbudakan telah ditemukan 5.145 orang yang berpotensi menjadi korban perbudakan. Untuk jumlah korban yang masuk dalam kategori kerja paksa 2.352 orang. Lalu jumlah korban yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual 1.744 orang. Dan lebih dari 2000 orang anak menjadi budak. Analisis perbudakan pada tahun 2017 menunjukkan latar belakang budak berasal dari 116 kebangsaan dimana Albania tercatat berjumlah 777 orang dan Vietnam berjumlah 739 orang yang berpotensi menjadi budak.

**Tabel 2 kategori berdasarkan umur dan jenis perbudakan**

Claimed exploitation Type	Female	Male	Trans-sexual	Unknown	Total 2015	2014 - 2015 % Change
Adult - Domestic Servitude	292	61	0	0	353	50.9%
Adult - Labour Exploitation	161	734	0	0	895	53.3%
Adult - Organ Harvesting	1	1	0	0	2	100.0%
Adult - Sexual Exploitation	813	48	2	0	863	28.2%
Adult - Unknown exploitation	98	73	0	0	171	-3.4%
Minor - Domestic Servitude	44	25	0	0	69	-2.8%
Minor - Labour Exploitation	21	267	0	0	288	39.8%
Minor - Organ Harvesting	0	3	0	0	3	200.0%
Minor - Sexual Exploitation (non-UK national)	89	23	0	0	112	20.4%
Minor - Sexual Exploitation (UK national)	95	10	0	0	105	64.1%
Minor - Unknown exploitation type	130	273	0	2	405	71.6%
<b>Total</b>	<b>1744</b>	<b>1518</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3266</b>	

Sumber : National Crime Agency **Invalid source specified**. NRM statistics  
- End of year summary 2017

Meningkatnya jumlah korban perbudakan lebih dari 80% dalam dua tahun salah satu penyebabnya adalah laporan masyarakat Inggris kepada *National Crime Agency* (NCA) (National Crime Agency, 2018). Diketahui masyarakat yang melaporkan telah memahami bentuk perbudakan modern dan sadar bahwa hal itu merupakan tindakan kriminal yang harus diamankan oleh pihak yang berwenang berdasarkan pernyataan perwakilan NCA, Will Kerr. Perwakilan dari bidang kriminalitas, Victoria Alkins menyebutkan orang-orang yang berpotensi menjadi budak akan mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan perlindungan. Hal ini memunculkan pendapat dari masyarakat Inggris bahwa pemerintah telah berhasil memimpin dunia dalam merespon kasus perbudakan modern yang menjadi fokus dunia.

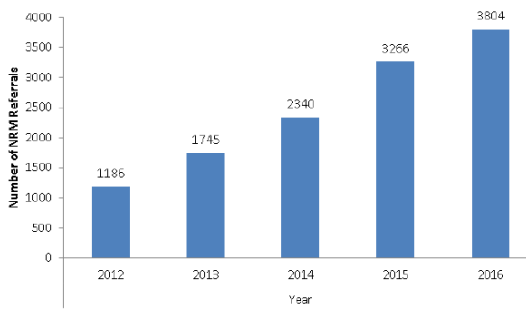
*National Referral Mechanism* juga menunjukkan data korban perbudakan pada tahun 2018 berjumlah sekitar 6.993 calon korban yang dirujuk ke dalam sistem dimana jumlah ini naik dari 5.142 pada tahun 2017 dan 3.804 orang pada tahun 2016. Para korban tersebut berasal dari 130 negara yaitu Inggris menjadi negara pertama yang paling banyak sekitar 1.625, lalu Albania sekitar 947 dan Vietnam 702. Angka-angka tersebut hanya mewakili sebagian potret kasus



perbudakan dan perdagangan manusia menurut Roy McComb seorang wakil direktur NCA. Meskipun terdapat peningkatan pemahaman dari masyarakat mengenai perbudakan modern, usaha untuk menghentikan perbudakan tidak bisa hanya pemerintah, Roy McComb mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan dan bantuan dari semua sektor publik dan swasta, NGO dan sebagian besar dari masyarakat.

*National Referral Mechanism* adalah kerangka kerja untuk mengidentifikasi korban perbudakan modern atau perdagangan manusia dan memastikan pada korban untuk menerima bantuan yang tepat dan mekanisme pengumpulan data mengenai korban, membantu dalam menjelaskan tentang ancaman. Dalam proses NRM, calon korban dirujuk oleh “respondem pertama termasuk polisi dan badan publik dan sejumlah NGO yang berwenang. Untuk korban perbudakan yang berasal dari wilayah EEA akan diperiksa dengan *National Crime Agency*, sedangkan untuk non-EEA akan diperiksa oleh *Home Office*. Mulai 29 April 2019 merubah fingsi *Home Office* menjadi otoritas kompeten tunggal untuk kasus rujukan (*National Crime Agency*, 2018).

**Grafik Batang 2 jumlah korban perbudakan berdasarkan sumber NRM tahun 2012 – 2016**



Sumber : HM Government  
Invalid source specified.2017  
UK Annual Repoert on Modern  
Slavery

Pada tahun 2014 berdasarkan data *Independent* jumlah perbudakan di UK lebih banyak daripada sebelumnya, dimana menurut catatan terdapat 10.000 – 13.000 orang yang menjadi korban perbudakan. Mereka banyak ditemukan sebagai pekerja rumah tangga yang tertahan, perempuan yang dipaksa dalam prostitusi, perkebunan, buruh pabrik dan pejualan manusia. Menurut data *National Crime Agency Human Trificking* tercatat jumlah terakhir budak di UK sebanyak 2.744 orang. Namun, menurut laporan BBC jumlah tersebut belum pasti dan masih lebih banyak di tahun 2013 dimana laporan ini dibuat oleh pemerintah secara resmi dengan skala tindakan, criminal, metodologi dan model statistik untuk mengungkap sisi gelap yang belum dan mungkin tidak pernah menjadi perhatian. Analisis dari *Home Office* yang diberikan kepada BBC bahwa 64% total korban adalah perempuan dan 36% adalah laki-laki. Dari total tersebut korban perbudakan berasal dari Albana, Nigeria, Vietnam, Rumania dan negara lainnya.

**Tabel 3 mayoritas negara korban perbudakan tahun 2013**

Country of Origin	Referrals as at Q4	Reasonable Grounds Decision					Conclusive Decision				
		Suspended	Withdrawn	Reasonable Grounds Decision Not Yet Made	Negative Reasonable Grounds Decision	Positive Reasonable Grounds Decision	Suspended	Withdrawn	Conclusive Decision Not Yet Made	Negative Conclusive Decision	Positive Conclusive Decision
Albania	87	1	4	14	8	60	1	0	41	9	9
Vietnam	52	6	0	7	8	31	3	0	15	8	5
Nigeria	48	0	0	5	9	34	0	1	26	3	4
Latvia	45	0	2	0	23	20	0	0	0	2	18
Romania	36	0	5	0	2	29	0	0	0	6	23
Lithuania	30	0	1	0	6	23	0	0	0	1	22
Hungary	29	0	0	0	0	29	0	0	0	1	28
United Kingdom	28	0	2	0	1	25	0	0	0	2	23
Slovakia	20	0	0	0	0	20	0	0	0	8	12
China	18	0	1	4	5	8	1	0	5	1	1
Poland	18	0	0	0	1	17	0	0	0	4	13
<b>Total</b>	<b>411</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>296</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>87</b>	<b>45</b>	<b>158</b>

Sumber : National Referral Mechanism **Invalid source specified**. Human Trafficking : National Referral Mechanism Statistics – October to December 2013

Data calon korban perbudakan modern dan perdagangan manusia menurut *National Crime Agency* (NCA) pada tahun 2017 adalah 5000 orang. Namun, angka ini belum sebanyak jumlah calon korban pada tahun 2016 yang mencapai sekitar 3805 korban. Dari total tersebut sekitar 30% nya adalah jumlah korban eksploitasi minor atau 1278 korban (National Referral Mechanism , 2017). Skala angka perbudakan modern dan perdagangan manusia terus menunjukkan peningkatan berdasarkan laporan NCA. Tidak mudah untuk mengidentifikasi alasan atau penyebab angka tersebut meningkat menurut Klara Skrivankova sebagai menejer program UK dan Eropa *Anti Slavery International*. Jumlah yang disebutkan sebelumnya jauh lebih tinggi dari laporan pemerintah yang menyebutkan sekitar 10.000 – 30.000 yang menjadi korban perbudakan modern dan perdagangan manusia. Beberapa tahun belakangan sector industri konstruksi menjadi sangat beresiko untuk para pekerja yang dieksploitasi, dimana mereka merasakan beberapa lapis *outsourcing* dan sub kontrak sementara dan last-minute. Disaat yang bersamaan pihak perusahaan bahkan tidak mengetahui asal muasal para pekerjanya, lebih dari sepertiga pekerja konstruksi tersebut bekerja tetapi tidak mendapatkan bayaran.

**Tabel 4 Jumlah Perbudakan berdasarkan golongan umur**

Claimed Exploitation Type	Female	Male	Trans-gender	Total 2016	2015 - 2016 % Change
Adult - Domestic Servitude	259	67	0	326	-7.6%
Adult - Labour Exploitation	182	925	0	1107	23.7%
Adult - Organ Harvesting	1	0	0	1	-50.0%
Adult - Sexual Exploitation	888	58	5	951	10.2%
Adult - Unknown Exploitation	70	72	0	142	-17.0%
Minor - Domestic Servitude	67	36	0	103	49.3%
Minor - Labour Exploitation	68	400	0	468	62.5%
Minor - Sexual Exploitation (non-UK national)	118	29	0	147	31.3%
Minor - Sexual Exploitation (UK national)	203	12	0	215	104.8%
Minor - Unknown Exploitation	80	265	0	345	-14.8%
<b>Total</b>	<b>1936</b>	<b>1864</b>	<b>5</b>	<b>3805</b>	

Sumber : National Referral Mechanism (**National Crime Agency, 2017**) Human Trafficking : National Referral Mechanism Statistics – October to December 2016

Ketika mengidentifikasi perempuan yang diperdagangkan dan mempertahankan mereka untuk tetap berada di Inggris, pada kenyataannya *Home Office* juga mendapat kritik karena terlalu ketat dan tidak merasa perlu untuk membangun kepercayaan antara korban dan pihak berwenang. Mereka juga dicap sebagai imigran legal terlebih dahulu karena hal-hal tersebut pada korban merasa sulit untuk bekerjasama dengan pihak berwenang Inggris.

### **3. 1. 2 Respon IGO dan NGO terhadap Kasus Perbudakan Modern di Inggris**

Organisasi Internasional yang juga aktif mendesak terlaksananya program dan melakukan pengawasan khusus terhadap kasus ini adalah *United Nations*. Mereka bertindak untuk mandate pengampunan. Lembaga UN yang berkaitan dengan kasus ini diantaranya UNICEF, ECOSOC, UNHRC. ILO juga berfokus pada masalah kerja paksa. IOM (*International Organization for Migration*) merupakan lembaga intra-pemerintah yang juga mengimplementasikan program pengembalian korban perbudakan modern secara sukarela dengan bantuan berbagai pihak dari seluruh dunia. Tahun 2017 dalam observasi pertama dengan sampel acak, data tentang kerja paksa dan pernikahan paksa di lebih dari 50 negara ILO bersama dengan IOM menggabungkan data mereka yang mana memberikan dasar kasus perbudakan modern yang kuat untuk diperkirakan dalam memberikan gambaran situasi di tingkat global dan regional.

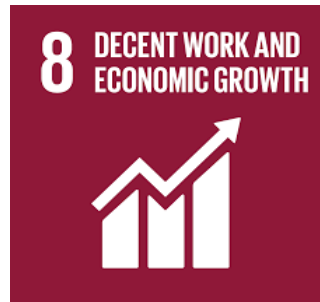
ILO memimpin dalam menyatukan para praktisi yang bekerja untuk mengidentifikasi apa persyaratan untuk upaya memberantas perbudakan sebagaimana disarankan oleh *International conference of Labour Statisticians* ke-19 pada tahun 2013 bahwa ILO membentuk kelompok kerja dengan maksud berbagi strategi terbaik untuk mendorong survey lebih lanjut di banyak negara. kelompok kerja harus melibatkan ILO dan para ahli lainnya dalam membahas dan mengembangkan

pedoman internasional untuk menyelaraskan konsep, menguraikan definisi statistic, daftar standar criteria dan alat survey kerja paksa dan menginformasikan dalam *International conference of Labour Statistic*.

Survey juga dilakukan oleh ILO dengan *Walk Free Foundation* pada tahun 2016 di 27 negara untuk memahami skala perbudakan modern yang melibatkan wawancara langsung dengan orang yang terlibat di seluruh dunia. Data-data yang diambil oleh ILO, IOM dan *Walk Free Foundation* ini adalah data yang akurat dan andat yang digunakan sebagai alat dalam mengatasi tantangan sosial yang kompleks. Tujuan dari adanya data tersebut tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran tapi juga membuat para pembuat kebijakan mengambil keputusan strategis berdasarkan bukti, proyek target dan membangun mitra untuk mengatasi kesenjangan. Intinya memungkinkan kebijakan dan tindakan yang diinginkan untuk dikembangkan ditingkat global, regional dan nasioanal yaitu melalui *The 2017 Global Estimate Of Modern Slavery*.

*Global Estimate of Modern Slavery* merilis produk *Alliance 8.7* yang tujuannya selain untuk meningkatkan kesadaran tentang estimasi global perbudakan modern dan pekerja anak, juga untuk mencapai target *Sustainable Development Goal 8.7* yang membahas masalah-masalah kerja paksa dan berhubungan dengan ketenagakerjaan muda yang berkualitas. Tujuan dari SDG ini bertujuan untuk saling terkait dan mencapai 169 target terkait untuk memandu pembangunan

**Gambar 8 Logo SDG 8**



**Sumber : SDG Knowledge Platform** Invalid source specified. **Sustainable Development Goals 8**

global. SDG 8.7 juga meminta pemerintah untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia, menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak dan pada 2025 bebas dari pekerjaan anak dalam semua bentuknya (International Labour Organization, 2017).

### **Gambar 9 Target dari Sustainable Development Goal 2030**



Sumber : Alliance 8.7 twitter Alliance 8.7  
2018

Dari aktor-aktor baru yang berkontribusi menangani kasus perdagangan manusia adalah Serikat Buruh (TUC) yang berfokus dalam peningkatan kesadaran para imigran dan beberapa biro individu dengan proyek yang juga fokus untuk meningkatkan kesadaran dan hak yang seharusnya didapat oleh pekerja imigran. Para pelaku yang terlibat tersebut biasanya bersedia untuk menangani kasus karena menyesuaikan dengan kebijakan dan agenda praktik mereka. Mayoritas berfokus pada eksploitasi seksual. Pada prinsipnya, masing-masing aktor mengejar kepentingan mereka sendiri dan mendefinisikan bidang kegiatan mereka ke dalam penegakkan hukum, pencegahan kejahatan dan memberi bantuan advokasi atas nama korban. Secara umum baik

pemerintah Inggris dan aktor-aktor yang terlibat tersebut memiliki kemiripan agenda untuk menghapuskan semua bentuk perbudakan modern. Meskipun demikian, para aktor yang tersebut tidak menjadikan kasus perdagangan menjadi salah satu bentuk kasus yang diutamakan dalam agenda mereka.

Setelah diperhatikan pergerakan pelaku perdagangan manusia semakin sulit dideteksi dan cenderung semakin rahasia. Kasus ini juga dikategorikan terpisah dengan kasus migrant illegal yang tidak diperdagangkan tetapi bekerja dengan keadaan mirip dengan perbudakan. Banyak praktik yang tidak lagi terlihat pada masa ini atau kriteria yang mungkin tidak jelas dalam karakteristik perbudakan yang mengontrol penuh korbannya. Penulis berpendapat bahwa kemungkinan jumlah tersebut jika dilihat kondisinya pada periode tahun 2013 hingga tahun 2017 jauh lebih tinggi. Untuk menghentikan perbudakan modern membutuhkan rencana yang matang dan tepat karena untuk mengetahui seperti apa bentuk perbudakan sangat sulit. Berikut ini beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbudakan modern, yaitu sangat membatasi individu untuk bergerak bebas, terlalu menguasai barang-barang pribadi individu dan menyetujui serta memahami tentang sifat hubungan antara pelaku dan korban yang tidak wajar.

Lembaga bentukan pemerintah aktif dalam hal pembuatan keputusan, perundang-undangan, penegakkan hukum, pendanaan program dan proyek anti perdagangan manusia di Inggris dan luar negeri, serta membantu melindungi korban. Pemerintah Inggris mengambil langkah untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan operasi penegakkan multi-lembaga. Pemerintah Inggris juga berusaha untuk mengatasi eksploitasi dalam rantai pasokan swasta dan bisnis. Undang-Undang perbudakan juga telah memuat tindakan kasus yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan rencana atau strategi apa untuk mengatasi perbudakan modern. RUU perbudakan memiliki 2 pelanggaran

substansif. Pertama, untuk *slavery*, *sertitude* dan *forced labour*. Kedua, untuk mengetahui perdagangan manusia. *Home Office* menjadi aktor yang secara rutin mengadakan pertemuan dengan kelompok multi-aktor untuk berkonsultasi tentang situasi di lapangan. Lebih dari 180 aktor individu dan organisasi bergabung untuk berkontribusi dalam proses konsultasi. Pekerja Lembaga Survei Masyarakat (NGO) telah meningkat dalam rentang waktu tahun 2001 – 2006 dimana mereka bergerak dibidang anti perdagangan manusia. Salah satunya yang fokus dalam bidang ini dan memiliki agenda memberantas secara aktif di Inggris adalah *Anti Slavery International*.

Pemerintah Inggris mengungkapkan bahwa kasus perbudakan modern dari perdagangan manusia untuk korban eksploitasi seksual sampai pekerja cuci mobil tidak belum bisa memenjarakan para pelaku kejahatan, mendukung para korban dengan memberikan perlindungan atau bantuan hukum atau menekan perusahaan untuk mengambil sikap tegas menurut pendapat yang diutarakan para aktivis anti perbudakan paska munculnya undang-undang yang mengatur perbudakan. Inggris bisa dikatakan sebagai international leader untuk memerangi perbudakan modern terlebih setelah mereka mensahkan *Modern Slavery Act* pada tahun 2015 yang mana undang-undang tersebut menetapkan bahwa pelaku kejahatan akan dihukum seumur hidup, menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan membuat perusahaan memeriksa rantai pasokan pekerja mereka, apakah terdapat kerja paksa atau tidak.

Setelah tiga tahun *Modern Act Slavery* 2015 berlaku, para aktivis anti perbudakan memberikan pujian karena fokus tujuan undang-undang tersebut untuk mengakhiri perbudakan modern dengan mempertimbangkan tindakan dan subsidi dana sekitar \$ 150 per tahun. Dibalik pujian tersebut, aktivis menyatakan bahwa *Modern Slavery Act* belum serius dalam menghentikan perdagangan gelap manusia yang telah menjerat



13.000 orang untuk kerja paksa. “*unfortunately, in practice, we are still waiting to really see many tangible outcomes from it yet.*” ujar Kate Roberts, kepala kantor *Human Trafficking Foundation*, bahwa mereka masih menunggu hasil yang nyata dari adanya undang-undang perbudakan modern tersebut.

Para aktivis anti perbudakan menyatakan bahwa kunci penting untuk memberantas perbudakan di Inggris dengan meningkatkan dukungan bagi para korban perbudakan untuk keluar dari lingkaran eksploitasi dan mendapat tempat yang aman. Akan tetapi, hukum tersebut menyuarakan kerangka tidak kerangka waktu atau menetapkan standar perawatan untuk korban yang lolos dari eksploitasi, membebaskan korban agar tidak dideportasi, dieksploitasi atau diperbudak lagi. “*(the potential victim) They become easy target again..*” adalah pendapat Jakub SABik dari Anti Slavery International yang berbicara pada Thomson Reuters Foundation dan kemudian menambahkan bahwa “*it’s literally releasing them back into the paws of traffickers.*”

Pemerintah Inggris beralih akan merombak cara menangani calon korban dengan melakukan perubahan baru termasuk memberikan layanan drop-in dan menambah tempat perlindungan. Pengadilan tinggi Inggris pun memutuskan bahwa mantan pelacur tidak boleh dipaksa mengungkapkan hukuman mereka karena dapat menyinggung status mereka sebagai korban perdagangan manusia dan beresiko bagi mereka ketika mencari pekerjaan. Para aktivis kembali memprotes pemerintah karena bantuan keuangan untuk para korban dikurangi setengahnya sehingga untuk kegiatan pemberantasan hanya mendapat 37 pound per minggu.

Anggota parlemen juga beralih bawa mereka sedang memperimbangkan RUU untuk memastikan para korban perbudakan mendapatkan dukungan. Apabila stabilitas dukungan jangka panjang diperbaiki, maka akan menghasilkan dukungan yang lebih baik untuk para korban, seperti meningkatkan level hukuman kepada pelaku kejahatan

perdagangan manusia. Para pegiat anti perbudakan menyatakan kembali bahwa Inggris masih terlalu lunak pada perusahaan. Dibawah aturan hukum, “*unless victim protection is enstrimed in law, you can forget it when it comes to securing convictions of traffickers.*” Kata Parosha Chandran, seorang pengacara terkenal anti perbudakan di Inggris (Human Trade Foundation, 2018).

### **3. 1. 3 Pengaruh Kuat *Anti Slavery International* dalam Memberantas Perbudakan Modern**

Sejak tahun 1819 *Anti Slavery International* bekerja untuk memberantas dan menghapuskan semua bentuk perbudakan modern, seperti kerja paksa, perdagangan manusia, perbudakan berbasis keturunan dan pekerja anak-anak. *Anti Slavery* membawa keahliannya sampai ke abad 21 ini untuk memengaruhi undang-undang dan kebijakan anti perbudakan di tingkat nasional dan internasional. *Anti Slavery International* menyusuri seluruh wilayah geografi dimana perbudakan terjadi dan melaluinya bersama mitra mereka untuk menyelidiki dan mengekspos kasus perbudakan modern; Mengidentifikasi dengan cara terbaik menghentikan pelanggaran kasus perbudakan; Memengaruhi pembuatan kebijakan untuk mengambil tindakan; Menekan untuk implementasi hukum yang efektif terhadap perbudakan; Mendukung korban perbudakan dalam perjuangan mereka untuk hidup bebas; Menuntut penghormatan terhadap HAM sebagai korban dan mendapat perlindungan. Untuk mengidentifikasi dan mengatasi perbudakan dalam rantai pasokan global *Anti Slavery International* menggandeng sektor swasta.

*Anti Slavery International* sangat jeli dengan setiap ruang yang dapat menempatkan organisasi terlibat dalam pemberantasan perbudakan. *Anti Slavery International* turut membantu pengawasan dan penguatan *The Modern Slavery Bill* sebagaimana laporan Frank Field MP pada tahun 2013 dan

laporan komite tentang *The Draft Modern Slavery* pada bulan April 2014. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam undang-undang Anti Perbudakan di Inggris dimaksudkan agar undang-undang tetap memiliki kekuatan, komprehensif dan menjadi perhatian bagi dunia. Dalam melakukan pengawasan *The Modern Slavery Bill* tersebut *Anti Slavery International* tergabung dalam *The Anti Trafficking Monitoring Group* (ATMG) yang secara sukarela memantau kepatuhan Inggris terhadap implementasi, konvensi *Council of Europe* tahun 2005 tentang anti aksi menentang perdagangan manusia serta petunjuk bagi Uni Eropa tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia dan melindungi korbannya. Keanggotaan ATMG adalah AFRUCA (*African Unite Againts Child Abuse*), *Amnesty International UK*, *Anti Slavery International*, *Bawso*, *ECPAT UK*, *Hellen Bamber Foundation*, *Poppy Project (of Eaveas Housing for Woman)*, *TARA project ( Trafficking Awareness Raising Alliance of Community Safety Glasgow (CSG))* dan *UNICEF UK*.

Seorang peneliti bernama Gary Craig pernah bekerja sama dengan *Anti Slavery International* untuk meneliti tentang perbudakan, perdagangan manusia, kerja paksa dan pernikahan menemukan bahwa perbudakan hadir dengan semua bentuknya di Inggris, termasuk adanya eksploitasi ekonomi yang parah, tidak adanya kerangka kerja HAM dan kontrol oleh satu orang atas orang lain dengan realitas kekerasan yang nyata. *Anti Slavery International* pun menyatakan bahwa perbudakan muncul karena tidak adanya aksi dari pemerintah untuk menanggapi permasalahan di masyarakat lalu munculnya prasangka terhadap kaum minoritas dan masalah kemiskinan. Akar penyebab masalah ini diperkirakan mengacu pada norma sosial yang seringkali lebih rendah dari penilaian terhadap keberadaan pabrik atau bisnis. Dengan praktik bisnis yang buruk yang tidak dipikirkan efek jangka panjangnya kemungkinan dapat mengembangkan tingkat perbudakan. Aktivitas pembelian tenaga kerja oleh industri pun sangat mendorong penggunaan kerja paksa,

pekerja anak atau hutang menjadi lebih banyak. Industri yang memasok tenaga kerja paksa diantaranya pabrik pengemasan makanan, pembantu rumah tangga, perawatan dan industri restoran serta perhotelan.

*Anti Slavery International* telah melakukan pendekatan secara komprehensif hingga ke akar untuk mengatasi permasalahan di tingkat lokal dan global. Oleh karena itu, *Anti Slavery International* selalu merasa terhubung pada kasus perbudakan dan tidak pernah berhenti untuk mencari manifestasi baru. Perhatian mereka lebih mengarah pada area geografis dan komunitas mitra lokal di negara-negara yang secara langsung mendukung lebih dari 115.200 orang yang terjebak dalam perbudakan untuk mengklaim hak dan mengendalikan hidup mereka. Meskipun *Anti Slavery International* tidak memiliki kantor di luar negeri akan tetapi aktivitas *Anti Slavery* dengan seluruh jaringannya konsisten melakukan survey dan secara rutin mengunjungi tiap proyeknya. Sistem kerja *Anti Slavery International* yang selalu mencari tau bagaimana situasi lokasi dan melakukan pendekatan khusus membuat lebih cepat untuk merealisasikan perubahan berkelanjutan untuk para korban perbudakan (*Anti Slavery International*).

Biaya kegiatan merupakan hal yang sangat krusial untuk setiap organisasi karena tanpa ada dana kegiatan dan program-program yang sudah terbentuk tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk biaya atau dana kegiatan, *Anti Slavery International* mengaku mendapat masukan dari berbagai kalangan, seperti individu, kelompok, penghasilan dari acara maupun wawancara dan selebihnya berasal dari lembaga internasional resmi. *Anti Slavery International* selalu berusaha menjaga kredibilitas dengan tidak memihak kepada siapapun. Bantuan dana yang masuk dari berbagai kalangan ini diartikan oleh *Anti Slavery International* sebagai bentuk kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, *Anti Slavery International* selalu berusaha maksimal disetiap kegiatan dan program

pemberantasan dan perlindungan perbudakan modern dan perdagangan manusia.

Eksplotasi dan sistem kerja paksa sebagian besar terjadi di industri yang bergantung pada pekerja lepas dan pekerja yang bersedia untuk diberikan upah rendah, tidak terikat serikat buruh, *labour intensive*, bersedia didominasi subkontrak dan sering dipersulit untuk melacak rantai pasokan. Dalam bisnis manufaktur sekalipun berupaya menekan biaya dengan meminta pekerja murah dalam jumlah besar kepada pemasok kemudian yang kemudian membuat pekerja menjalani sistem subkontrak kerja yang tidak diatur dengan benar. Keberadaan penyedia tenaga kerja ini termasuk kategori ilegal dan dapat dijadikan bukti adanya permintaan tenaga kerja murah dari pemasok.

Berdasarkan penelitian, eksploitasi terhadap tenaga kerja paksa banyak yang tidak terdeteksi karena dilakukan secara tersembunyi. Ketika merekrut korbannya, pelaku melakukan cara yang tidak membuat korbanya curiga tetapi diberberapa kasus sering ditemukan pelaku menggunakan kekerasan fisik. Diawal pelaku akan menjanjikan pekerjaan, namun saat sampai di tempa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan akhirnya si korban terpaksa menerima diri menjadi budak. Memanipulasi, menekan korban secara psikologis dan mengancam dengan kekerasan merupakan taktik untuk mempertahankan dan menekan korban.

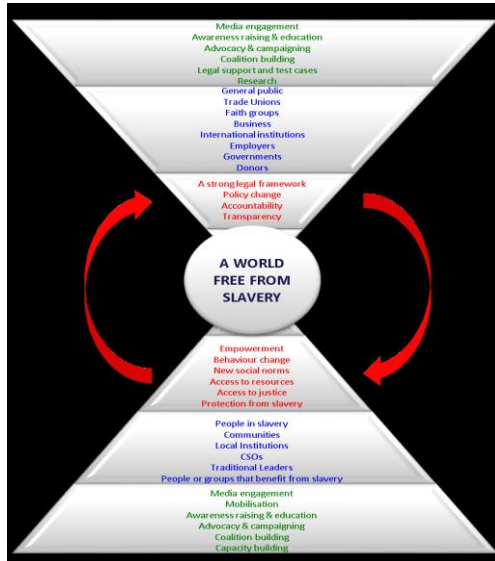
Dalam menilai dan mengukur sebuah masalah, *Anti Slavery International* melakukan evaluasi independen dengan pihak ke tiga untuk memastikan kebenaran data dan informasi. Dengan advokasi yang dilakukan dengan baik di setiap kasus membuat *Anti Slavery International* hampir tidak merasa kesulitan untuk mengukur permasalahan digabungkan dengan strategi *Anti Slavery* yang menyesuaikan undang-undang yang berlaku di seluruh dunia. Demikian keunikan *Anti Slavery* untuk mengenali, memahami dan menangani bentuk perbudakan modern. Tak heran sejak 1839 mereka masih

memiliki reputasi yang sangat baik dan kuat dalam memajukan kasus perbudakan menjadi agenda politik melalui penelitian, advokasi, kampanye dan intervensi lokal.

Keterlibatan *Anti Slavery International* dalam pengembangan undang-undang yang menentang perbudakan seperti UN 1926, *Slavery Convention* 1956, sejumlah undang-undang konvensio ILO, konvensi kerja paksa dan pekerja anak dan konvensi perdagangan manusia *Council of Europe* membuat posisinya semakin dihormati. Dimana semua undang-undang tersebut masih dijadikan acuan dalam kerangka hukum saat ini. *Anti Slavery International* juga memiliki posisi khusus untuk mengidentifikasi, memahami dan menangani bentuk perbudakan modern pada abad ke 21. Mereka mengidentifikasi perbudakan dengan teori mereka tentang perubahan dan bekerja ditingkat struktural serta tingkat akar rumput untuk mengubah kebijakan dan praktik langsung. Hal ini terus dilakukan untuk mendorong perubahan perilaku dan menciptakan norma-norma sosial baru yang memungkinkan orang telah dilecehkan dan dieksploitasi untuk mengklaim HAM korban perbudakan.

Dalam proses eksekusi, *Anti Slavery International* tidak menyebut dan memalukan perusahaan yang terlibat, meskipun beberapa diantaranya diketahui publik karena kesalahan rantai pasokannya sendiri, ditambah *Anti Slavery International* cenderung untuk tidak mengutuk pihak manapun. Bagaimanapun keadaannya apabila mereka terbukti melakukan perbudakan dan perdagangan manusia mereka harus bertanggungjawab dan melakukan segala cara untuk memutus rantai pasokan perbudakan. Apabila *Anti Slavery International* memboikot suatu perusahaan yang terlibat perbudakan, dikhawatirkan akan membuat suasana menjadi semakin rumit dan melukai orang yang tidak melakukan eksploitasi juga memperburuk kemiskinan. *Anti Slavery International* selalu mendorong pelaku untuk menggunakan kekautannya sendiri untuk memberantas kasusnya, karena sebenarnya itulah senjata utama menyelesaikan masalah.

**Tabel 5 strategi Anti Slavery International**



Sumber : Anti Slavery International **Invalid source specified.** How We Work to End Modern Slavery

Setelah menyelidiki pergerakan *Anti Slavery International* sejak 1839 melalui laporan yang mereka buat sendiri di website [www.antislavery.org](http://www.antislavery.org), membaca karya ilmiah yang dituliskan oleh berbagai peneliti, mitra yang pernah bekerja dan laporan berita *onlinedapat* ditarik kesimpulan bahwa strategi yang aplikasikan *Anti Slavery International* sangat terstruktur.

**Tabel 6 *Power* dan Tekanan *Anti Slavery International* terhadap pemerintah Inggris**

<b>Kekuatan (Power)</b>	<b>Dampak</b>
Negosiasi kebijakandengan pemerintah Inggris	Pemerintah mengakui bahwa perbudakan terjadi dan harus dihapuskan
Terlibat dalam pembuatan undang-undang di United Nation	Menghasilkan undang-undang <i>Convention Against Transnasional Organisme Crime</i> tahun 2000
Terlibat dalam pembuatan undang-undang di ILO	<i>Convention Concerning Forced or Compulsary Labour</i> tahun 1930
Terlibat dalam pembuatan undang-undang di Inggris	Parlement Inggris memperkenalkan RUU tentang perbudakan modern pada Juni 2014 dan <i>The Draft Modern Slavery</i> pada bulan April 2014
Mengawasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perbudakan dan perdagangan manusia	Membuat laporan berkala yang berisis tentang pelaksanaan arahan perdagangan Uni Eropa (EU/2011/36)
Hadir dalam berbagai konvensi dan sidang internasional	Mengikuti arahan dari United Nations , ILO dan lainnya untuk mengaplikasikannya dalam bentuk kebijakan dan undang-undang perbudakan modern dan perdagangan manusia.

<b>Tekanan (Pressure)</b>	<b>Dampak</b>
---------------------------	---------------



<p>Menekan pemerintah Inggris untuk memperbaharui kebijakan perlindungan korban budak</p>	<p>Pemerintah menerbitkan <i>Modern Slavery Act</i> 2015 sebagai langkah baru dalam menghadapi dan menghapuskan perbudakan</p>
<p>Menekan pemerintah Inggris untuk meningkatkan hukuman bagi pelaku perbudakan dan perdagangan manusia</p>	<p>Memberikan hukuman penjara seumur hidup dan membayar denda sesuai dengan <i>Modern Slavery ACT</i> 2015</p>
<p>Menghapuskan perbudakan modern disemua sector</p>	<p>Mengusahakan meningkatkan informasi, perlindungan dan hukuman agar permasalahan berhenti atau setidaknya berkurang</p>
<p>Memberikan bantuan dan layanan psikologis kepada korban perbudakan</p>	<p>Pemerintah menyediakan kompensasi dan dukungan untuk korban perbudakan melalui The Pro-Act Project</p>

<p>Meminta kepada seluruh perusahaan untuk tidak menggunakan pekerja ilegal</p>	<p>Berdasarkan undang-undang tentang anti-perbudakan mewajibkan perusahaan dengan omset untuk menerbitkan rencana mencegah pelanggaran dalam rantai pasokan mereka dan Home Office untuk menyimpan daftar semua perusahaan yang wajib membuat rencana dan memberikan denda jika ada yang melanggar</p>
---	--

Sumber : Update : Anti-Slavery International and the UK's Modern Slavery Bill (Anti Slavery International, 2014) <https://www.antislavery.org/update-anti-slavery-international-uks-modern-slavery-bill/>, Interventions to support victims of modern slavery (GOV.UK, 2017) <https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/interventions-to-support-victims-of-modern-slavery>, Helpdesk : K4D (GOV.UK, 2017)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anti slavery memiliki pengaruh dalam kebijakan domestik Inggris, termasuk dalam pengakuan pemerintah atas keharusan penghapusan perbudakan, serta dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai perbudakan modern oleh Parlemen Inggris pada April 2014. Anti slavery juga memiliki pengaruh dalam badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *International Labor Organization* (ILO), yang dapat dilihat dari diterbitkannya undang-undang *Convention Against Transnational Organized Crime* yang mengatur mengenai perdagangan manusia pada tahun 2000 dan *Convention Concerning Forced or Compulsory Labour* yang mengatur tentang kerja paksa pada tahun 1930. Demi terlaksananya usaha menghapuskan perbudakan, Anti Slavery International melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan ketetapan

pemerintah dan badan internasional dengan memeriksa laporan kegiatan mereka secara berkala. Laporan tersebut dimanfaatkan oleh Anti Slavery International untuk terus menekan seluruh negara untuk terus mengusut kasus perbudakan sampai habis, meskipun belum banyak upaya yang dilakukan oleh negara-negara untuk menghapuskan perbudakan. Inggris adalah salah satu negara yang sangat aktif untuk mengusut kasus ini.

*Anti Slavery* juga memiliki *pressure effect* yang berdampak pada pembaruan undang-undang untuk memperbaiki nasib buruh di Inggris, dan memiliki efek jera bagi pelaku perbudakan. Inggris juga menertibkan perusahaan-perusahaan agar tidak terlibat dalam kasus-kasus yang termasuk ke dalam kategori perbudakan modern. Sebelumnya *Anti Slavery International* menekan pemerintah untuk memperbaharui kebijakan dan undang-undang lama terkait perlindungan korban perbudakan. Melihat kasus perbudakan yang tidak kunjung habis dan menerima masukan dari *Anti Slavery International* dan aktor lainnya, akhirnya Inggris mengeluarkan *Modern Slavery Act* sebagai undang-undang baru yang mengurus kasus perbudakan dengan lebih baik, lebih ketat dan lebih tegas untuk menghukum para pelaku kejahatan perbudakan modern dan perdagangan manusia. Bentuk lain dari usaha pemerintah Inggris untuk melindungi korban perbudakan adalah dengan memberikan kompensasi, dukungan medis untuk pemulihan mental, meningkatkan layanan informasi, memudahkan masyarakat dan korban untuk melapor kepada pihak berwajib. Pemerintah Inggris juga semakin menyudutkan para pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman berat dan denda yang besar.

Meskipun telah dilakukan perbaikan hukum dan kebijakan oleh pemerintah Inggris dan badan internasional, *Anti Slavery International* melihat kesenjangan yang kontras dalam penetapan hukuman untuk pekerja paksa, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 25 Konvensi ILO, hukuman seharusnya lebih berat daripada Undang-Undang

Ketenagakerjaan yang turut menghukum majikan dan menawarkan perlindungan pada korban perbudakan yang belum diberdayakan. Untuk menghormati Hak Asasi Manusia, Inggris seharusnya tidak boleh membedakan pertimbangan apakah mereka mematuhi fungsi publik atau telah menjalankan layanan publik. Perbudakan yang melanggar HAM dalam bentuk apapun tidak dapat diterima oleh siapapun.

Selain itu, *Anti Slavery International* percaya bahwa perusahaan-perusahaan di Inggris turut berkontribusi dalam memberantas perbudakan. Mereka melakukannya dengan pemutusan rantai pasokan jika pemasok mereka menggunakan tenaga kerja paksa dalam produksi barang mereka. Meskipun begitu tidak membuat masalah perbudakan modern dan perdagangan manusia seketika selesai, karena kurangnya pedoman hukum dan peraturan yang ada dan masih banyak yang tidak tahu, mengapa serta langkah apa yang harus diambil untuk mencegah kerja paksa.

Disinilah kebutuhan adanya kerjasama pemerintah dengan organisasi pengusaha tentang undang-undang serta memberikan dukungan dan panduan tentang langkah praktis yang dapat dilakukan untuk memenuhi kewajiban dan komitmen untuk meminimalisir adanya kerja paksa dan kasus lainnya. Dorongan pemerintah terhadap perusahaan juga harus disertai dengan langkah-langkah yang melindungi pekerja dengan memberikan bantuan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan perlindungan dan bantuan sistematis untuk orang-orang yang terjebak dalam kerja paksa, misalnya perlindungan pada pekerja migrant yang tidak termasuk dalam kategori orang yang diperdagangkan. Misalnya, kemitraan yang dibentuk antara *Cadbury's Cocoa* dan pemerintah Inggris yang tampaknya tulus dan berkelanjutan untuk mengatasi rantai pasokan kerja paksa, pekerja anak dan kelestarian lingkungan serta pertanyaan yang lebih dari persoalan perkembangan demokrasi.

Meskipun Inggris sudah membuat jalan untuk para korban mengklaim hukum pidana, perdata dan perburuhan, pada kenyataannya hanya sebagian kecil yang pasti mendapat hak-haknya ataupun kompensasi. Undang-undang Inggris masih menjadi seperti angan-angan bagi korban untuk mendapat perlindungan hukum dan meskipun terlihat adanya peningkatan jumlah hukuman untuk perdagangan manusia, upaya hukum dan kompensasinya masih sulit untuk diakses oleh orang yang menjadi korban perdagangan manusia, pekerja yang tidak memiliki dokumen lengkap. Sejumlah orang bahkan dikeluarkan dari pengadilan ketenagakerjaan karena status imigrasinya. Pekerja tersebut tidak memiliki hak untuk mengklaim upah mereka yang tidak dibayarkan oleh majikan. Dengan level hukum yang masih lemah membuat kurangnya bantuan hukum yang tersedia untuk mengejar klaim sipil atau klaim pekerjaan yang mana membuat korban sulit mendapatkan perwakilan hukum yang tepat. Bagian penting dari undang-undang baru untuk memerangi perbudakan modern di Inggris yaitu hukuman seumur hidup untuk mereka yang terbukti bersalah atas kasus perdagangan manusia yang berlaku mulai tahun 2015 di Inggris. Pengadilan pun mendapat kekuasaan untuk member perintah yang membatasi perdagangan manusia.

Terkait usaha Inggris untuk menghapuskan perbudakan, pada tahun 2012 pemerintah Inggris dan kelompok masyarakat sipil membentuk forum *The Joint Strategic Group* (JSG) untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam koordinasi dan kegiatan anti perbudakan manusia. Grup ini bertindak untuk member saran dan umpan balik untuk mendukung pekerjaan *Internal Departmental Ministerial Group* (IDMG) di kementerian keamanan. Disini Anti Slavery International mengambil bagian dalam subkelompok, yaitu *International Engagement* sebagai ketua dengan FCO (*The Foreign and Commonwealth Office*) dan *Forced Labour* yang juga sebagai ketua (HM GOVERNMENT, 2013). *Anti Slavery International* merasa

bahwa hal-hal yang menghambat penghapusan kasus perbudakan pada dasarnya adalah struktur sosial hierarkis yang ketat dan sistem kasta, kemiskinan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak dan kebutuhan pembangunan yang lebih.

Seymar Descher dan David Bryon Davis, pemerhati kasus perbudakan juga memberi pernyataan terkait penghapusan perbudakan di Inggris. Kekuatan dalam abolisionisme Inggris, ungkap Descher dan Bryon, adalah sentimental moral yang menawarkan kebebasan individu sebagai norma universal dan perbudakan sebagai institusi aneh yang harus dihapuskan. Quirk dalam bukunya mengusulkan “Proyek Anti Perbudakan” yang akan membentuk kerangka kerja analitis yang membedakan antara penghapusan hukum dan pembebasan efektif adalah dengan merinci bentuk perbudakan yang berbeda dan lebih dari sekedar menjadi ekspresi yang menggugah perasaan.

Secara historis, asal usul munculnya hukum internasional dan pengadilan yang membahas tentang HAM terjadi karena kampanye Inggris melawan perdagangan budak pada abad 19. Ahli teori hukum Eropa menetapkan bahwa mereka yang melakukan pembajakan adalah *holistis humanis generis* atau musuh semua manusia. Inggris menggunakan angkatan lautnya untuk menghentikan perbudakan kapal di laut dan diperairan pantai. Kemudian, dibawa ke *Mix Courts of Commission*. Angkatan laut dan pengadilan Inggris membantu untuk mendapatkan yurisdiksi internasional atas perdagangan budak. Dimulai sebagai *Anti Slavery Society*, organisasi ini menjadi bagian dari proyek anti perbudakan sejak kampanye Inggris melawan perdagangan budak dan perbudakan. Beberapa kekuatan yang memaksa Inggris untuk mengambil lebih banyak tindakan terhadap perbudakan karena pengaruh *Anti Slavery International*. Tak lama setelah parlemen melarang perdagangan budak Inggris, para abolisionis di Inggris memobilisasi kejaaraan untuk mengakhiri

perbudakan di kekaisaran, utamanya di koloni Karibia Britania.

Dalam *International Parliamentary Union* terdaftar 165 badan parlemen dari 109 negara yang fokus dalam masalah Hak Asasi Manusia, meskipun tidak lebih dari 63 badan permanen di 49 negara yang mengkhususkan agenda mereka ke dalam masalah HAM. Tidak semua komite memantau implementasi perjanjian yang telah disetujui dalam rapat, konvensi dan pertemuan tingkat tinggi. Inggris menjadi salah satu negara yang telah mendirikan *Joint Committee on Human Right* pada tahun 2001 sebagai bentuk keseriusannya. Komite tersebut memasukan amanat untuk melakukan pengawasan untuk komabilitas HAM dan kepatuhan terhadap perjanjian HAM.

Sebagai LSM yang memotivasi penduduk dan menekan pemerintah, *Anti Slavery International* saat itu menekan perdagangan budak dan perbudakan yang kemudian pengaruh Inggris meluas ke seluruh dunia. *Anti Slavery International* pun mendapat sebutan *Anti Slavery* dan *Aboligines Protection Society* selama pemerintahan colonial Inggris karena mereka memainkan peran konsekuensial selama abad ke 20. Dalam buku "*The Power of Humanitarian Agitation*" oleh Suzanne Miers membahas bagaimana orang-orang ini mengerahkan lebih banyak dari orang lain, baik di Inggris dan di tempat lain (Sochan, 2015).

Sepanjang abad 20 *Anti Slavery International* menyediakan banyak layanan untuk memerangi perbudakan. Terlepas dari kesulitan dihadapi, *Anti Slavery International* tetap berhasil mendapatkan informasi berkualitas tentang perbudakan untuk komisi Anti Perbudakan. Karena LSM memiliki kepentingan untuk mengakhiri perdagangan mansia ternyata muncul berbagai bentuk kemarahan namun sedikit analisis tanpa berdasarkan fakta. Meskipun begitu, Kevin Bales, seorang profesor Perbudakan Kontemporer di Universitas Nottingham, percaya *Anti Slavery International* adalah

pemimpin dalam memberikan laporan fakual. Ia juga merujuk pada arsip organisasi yang terorganisasi dengan baik dan dirawat dengan baik di London. Dibidang penyedia informasi, *Anti Slavery International* telah melakukan layanan yang luar biasa.

Selain menyediakan layanan informasi, *Anti Slavery International* juga berhasil membuat kasus perbudakan modern menjadi kasus penting yang harus ditindaklanjuti dan diberantas segera oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dunia (The University of British). Setelah itu mereka menjadi organisasi yang ikut merancang undang-undang perlindungan budak bersama *International Labour Organisation* dan *United Nations*. Kemudian, *Anti Slavery International* juga berhasil menekan pemerintah India untuk meratifikasi konvensi internasional mengenai kasus perlindungan buruh anak pada tahun 2017 (*Anti Slavery International*) dan kasus pembebasan 2 (dua) budak yang dipenjara oleh tuannya di Mauritania atas kerjasama dengan SOS-Esclaves (*Anti Slavery International*).

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *Anti Slavery International* untuk memberantas kasus perdagangan manusia kemudian berlanjut menjadi perbudakan modern di Inggris seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya dan penulis melengkapinya pada bab ini, telah membuktikan bahwa dalam kasus perbudakan di Inggris ditemukan keterlibatan *Anti Slavery International* yang berusaha memengaruhi pemerintah untuk memperbaharui kebijakan dan peraturan hukumnya demi memperketat perlindungan terhadap orang-orang yang telah menjadi budak dan menghapuskan sistem perbudakan. *Anti Slavery International* bertindak sesuai dengan tujuan dan agenda dan konsentrasinya, yaitu menghapuskan sistem perbudakan dan perdagangan manusia di seluruh dunia.

Alasan dibalik sikap berani *Anti Slavery International* mengambil langkah untuk menghapuskan perbudakan yaitu



karena perbudakan konvensional maupun kontemporer atau modern dalam berbagai bentuk membuat masyarakat yang terlibat semakin terpuruk daripada sebelumnya. Mungkin dalam beberapa sisi adanya perbudakan dimaksudkan untuk membuka dunia dan harapan baru bagi kehidupan masyarakat yang kekurangan menjadi lebih baik, akan tetapi hal yang terjadi justru sangat berbeda. Faktor yang menandai organisasi ini sebagai organisasi yang pertama kali memperkarakan kasus perbudakan sejak tahun 1839 membuat *Anti Slavery International* percaya diri untuk terus melangkah.

Pemikiran *Anti Slavery International* yang disebarakan untuk memengaruhi pemerintah Inggris tentang betapa bahayanya praktik perbudakan manusia dibiarkan tetap terjadi terus menerus, maka akan menghancurkan kedaulatan Inggris sebagai bangsa yang besar. Penulis berpendapat bahwa upaya *Anti Slavery International* yang telah dilakukan selama 180 tahun telah berhasil membuat pemerintah membuat kebijakan dan memperbaharainya untuk melindungi korban perbudakan dan menghukum pelakunya.

Adapun teori yang penulis gunakan untuk menganalisa masalah ini yaitu dengan konsep *Two Faces of Power* dan *Pressure Group*. Konsep ini masih belum begitu populer dan jarang digunakan oleh kalangan akademisi Hubungan Internasional dan orang-orang yang konsen dalam masalah perbudakan. Pertama, untuk konsep *Two Faces Of Power* merupakan bentuk wajah kedua dari kekuasaan. Pertama kali konsep *Power* dipopulerkan oleh Robert Dahl sebagai bentuk kontribusinya di bidang ilmu politik. Dimana menurut Dahl, kekuasaan adalah ketika A melakukan kekuasaan yang dapat membuat B untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak akan dilakukan oleh B. Menurut Dahl pemikirannya ini dapat digunakan untuk membandingkan kekuatan aktor-aktor yang terlibat dalam bidang tertentu, misalnya memengaruhi berbagai senator AS terhadap kebijakan luar negeri. Namun, Bachrach dan Baratz (pencetus *Two Faces Of Power*) dan Steven Lukes (pencetus *Three*

*Faces of Power*) menilai bahwa definisi yang dijelaskan oleh Dahl masih memiliki kekurangan untuk dapat menangkap dan menjelaskan dimensi penting mengenai kekuasaan, seperti kapasitas seorang aktor untuk membentuk norma dan nilai yang dipegang oleh orang lain. (Munro, 2012).

Menurut Bachrach dan Baratz pada wajah kekuasaan kedua ini lebih menjelaskan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan memengaruhi para pembuat keputusan, yaitu negara sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh. Selain itu, konsep wajah kekuasaan kedua ini mempelajari kapasitas dari para aktor yang terlibat dalam mengendalikan suatu agenda untuk menjadi pembahasan dalam pengambilan keputusan. Keith Fauks menjelaskan bahwa konsep ini memiliki hierarkis diantara kelompok-kelompok sosial dimana para aktornya berada diposisi kuat dan memiliki kemampuan untuk mencapai kepentingannya, serta mampu mencegah kepentingan lain. Kemudian, Steven Heywood menambahkan bahwa pengertian untuk konsep ini lebih kepada pengaturan agenda dan kemampuan untuk mencegah keputusan yang sedang dibuat mengatur dan mengendalikan agenda politik sehingga dapat tersampaikan.

Alasan umum suatu organisasi dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kepentingannya melalui program-program dan agenda yang ditujukan untuk orang banyak ataupun untuk kepentingan sendiri. Terlihat kesesuaian antara konsep *Two Faces of Power* dan *Anti Slavery International*, yaitu organisasi yang dibuat untuk tujuan dan agenda menghapuskan sistem perbudakan dengan berbagai bentuknya yang telah merugikan kehidupan orang banyak dan menghukum pelaku dengan ketentuan hukum yang setimpal dengan tindakan yang dilakukannya.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa dengan kontribusi selama 180 tahun *Anti Slavery International* telah menunjukkan keberanian dan komitmennya tanpa henti. Selain itu, usaha

untuk memengaruhi yang tidak hanya ditujukan kepada pemerintah Inggris tetapi juga *United Nations*, *International Labour Organization* dan lainnya untuk membuat keputusan berupa kebijakan dan Undang-Undang perbudakan, perdagangan manusia dan imigrasi berhasil. Ini adalah bukti bahwa *Anti Slavery International* memiliki *power* yang sangat kuat. Apabila menemukan bahwa selama perjalanan Anti Slavery International menghadapi kasus perbudakan bersama dengan organisasi lain disebut kurang kuat pengaruhnya, kurang pas sebab untuk menangani kasus yang begitu kompleks ini tidak bisa langsung oleh satu pihak, perlu ada pihak lain yang lebih mengenal, memahami dan mengerti kondisi orang-orang yang terlibat suatu dalam masalah. Dengan adanya kerjasama ini sebenarnya adalah langkah untuk memudahkan kasus untuk diselesaikan.

Kedua, untuk konsep *Pressure Group*. Munculnya keberadaan kelompok penekan adalah untuk mempromosikan sebuah identitas individu atau kelompok yang mendukungnya, serta melindungi keadaan sosial, ekonomi dan budaya. Mereka juga berperan sebagai lidah penyambung aspirasi, opini, saran dan kritik dari masyarakat kepada pemerintah. Pada dasarnya, mereka ingin memanfaatkan kebijakan para penguasa dalam memenuhi kepentingan mereka dan memengaruhi proses pengambilan keputusan tanpa harus berpartisipasi pada hal politik secara langsung. Mereka mengatur tujuannya dengan melakukan berbagai macam negosiasi untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Menurut Ichwan Muis, partisipasi kelompok penekan adalah sebagai upaya memberikan “aksi” terhadap proses penetapan kebijakan, karena diharapkan dapat memberikan tekanan kepada targetnya, yang dalam hal ini adalah pemerintah Inggris dan lembaga internasional terkait. Apabila usaha mereka dengan negosiasi, melobi dan menyebarluaskan berita melalui media massa tidak berhasil, sebagai langkah terakhir mereka melakukan pemogokan atau boikot dan

demonstrasi. Salah satu karakteristik dari kelompok penekan yang menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan masyarakat atau negara, jadi mereka tidak segan untuk bekerjasama dengan kelompok lain untuk mencapai tujuan mereka.

Penjelasan diatas mengenai kelompok penekan bisa penulis katakan sangat sesuai dengan *Anti Slavery International* sebab dari *power* yang dimiliki oleh organisasi ini mampu menerangkan posisinya sebagai kelompok penekan. *Anti Slavery International* jika dilihat dari segi karakter memang berusaha untuk menekan pemerintah Inggris untuk membuat kebijakan untuk melindungi korban perbudakan melalui undang-undang. Kebijakan undang-undang yang berhasil dikeluarkan pemerintha Inggris, UN dan ILO atas pengaruh *Anti Slavery International* antara lain, *Slavey convention 1926*, *Suplementary convention 1926*, *Sexual Offence Act 2003*, *Asylum and Immigration Act 2004* danyang terbaru adalah *Modern Slavery Act 2015*.

### **3. 2. 3 Kekuatan (*power*) yang dimiliki *Anti Slavery International* Dalam Memerangi Perbudakan Modern**

Sepanjang tahun 2018 *Anti Slavery International* telah memperkuat 17 gerakan anti perbudakan di 19 proyek di 14 negara. *Anti Slavery International* berusaha untuk mengubah undang-undang dan kebijakan untuk menghentikan perbudakan. Beberapa proyek yang berhasil dilakukan oleh *Anti Slavery International*, yaitu sekitar 307 orang yang menjadi budak secara turun temurun mendapat pelatihan membaca di Mauritania, ekitar 77.388 orang telah diberdayakan untuk mengklain hak-hak mereka dan 54 sekolah berdiri untuk menghentikan kasus kerja paksa anak-anak di Senegal. Belum lama ini *Anti Slavery International* berhasil mengidentifikasi kasus dengan menggandeng pengacara membawa kasus pemotongan dana yang seharusnya diterima korban perdagangan manusia untuk membeli kebutuhan kesehatan atau konseling. Dana yang dipotong oleh

*Home Office* pada Maret 2018 jumlahnya sebesar £ 65 – £ 37,75.

### **3. 2. 1 Implementasi kasus berdasarkan konsep *Two Faces Of Power***

#### **1) Meminimalisir Perbudakan Anak Di Nigeria Melalui Pendidikan**

Sebanyak 6 (enam) sekolah yang telah dibangun untuk membantu anak-anak korban perbudakan keturunan juga terjadi di Nigeria atas kerjasama dengan organisasi lokal, yaitu Timirdria. Ini adalah pertama kalinya anak-anak tersebut bahkan mencapai tingkat kelulusan yang mana terdapat 80% rata-rata kelulusan sekolah pada tahun ajaran 2017-2018 dan lebih dari 53% rata-rata nasional. Dari total 132 siswa dinyatakan lulus, termasuk 49 anak perempuan didalamnya telah diterima di sekolah menengah. Masih dari berita menenai perbudakan di Nigeria bahwa sebanyak 273 keluarag menerima pinjaman mikro, dimana sekitar 2741 adalah pekerja anak di Tanzania dan 703 anak bersedia untuk masuk sekolah.

Proyek ini ditujukan untuk memutuskan hubungan antara budak dengan pemilik lamanya. Kemudian, proyek ini juga dijadikan penghubung proyek lainnya yang melibatkan masyarakat, seperti pinjaman mikro untuk keluarga membuka usaha, pelatihan HAM dan advokasi yang utamanya membahas kesetaraan gender dan kepemimpinan permuan dan membangun sumur di tiga komunitas untuk kebutuhan hidup. Upaya ini membuahkan hasil yang lebih dari perkiraan, yaitu orang-orang yang ada di desa berani untuk mengambil tindakan langsung mempertahankan pelayanan bank sereal dan makanan gratis untuk kelangsungan hidup masyarakat Nigeria.

Dalam upaya meminimalisir adanya perbudakan, khususnya budak anak-anak, Anti Slavery International memberikan dukungan hukum dengan mengirimkan pengacara untuk mendapatkan dokumen identitas dan mengajukan klaim

atas tanah yang mereka miliki (Anti Slavery International). Dukungan hukum ini terbukti dalam keberhasilan Anti Slavery International dan Tirmidria memenjarakan seorang pria di Nigeria yang melakukan aksi Fifth Wife (memiliki istri lima). Meskipun Nigeria telah resmi melarang perbudakan sejak tahun 2003 aksi perbudakan tidak berhenti. Selain itu, Anti Slavery International juga berhasil membawa kasus ini ke pengadilan dan pada tahun 2008 the West Regional regional body Ecowas menyatakan bersalah karena gagal melindungi perempuan dari perbudakan (BBC News, 2014).

## 2) Mengadvokasi Pemerintah India Untuk Meratifikasi Hukum Internasional

### Gambar 10 buruh anak di India

Atas kesabaran dan konsisten untuk mengadvokasi pemerintah India selama bertahun-tahun, *Anti Slavery International* dan mitra lokal di India akhirnya berhasil membuat pemerintah India meratifikasi dua perjanjian hukum internasional yang berkaitan dengan pekerja anak, *The Worst Forms of Child Labour Convention* dan *Minimum Age convention*.



Sumber : Anti Slavery International (**Anti Slavery International, 2016**) India Ratifies International Child Labour Conventions

Selama melakukan penelitian *Anti Slavery International* melihat kondisi tempat bekerja yang sangat berbahaya untuk anak-anak dibawah umur berada disekitarnya atau lebih parahnya bekerja dilingkungan tersebut dalam waktu yang lebih dari sembilan jam per hari di musim panas dan tujuh jam per hari di musim dingin. *Anti Slavery International* dan mitra meminta pemerintah India untuk memastikan seluruh anak-anak dibawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan bekerja atau

menjadi budak di industri apapun dan mewajibkan pemerintah untuk melaporkan implementasi dan kepatuhannya terhadap undang-undang dan konvensi yang telah di ratifikasi (Anti Slavery International, 2016).

### 3) Pernikahan Paksa Resmi Diakui Sebagai Bagian Dari Perbudakna Modern

Gambar 11 Child Marriage



Gencarnya kampanye yang dilakukan *Anti Slavery International* untuk kasus perbudakan dalam bentuk pernikahan paksa selama bertahun-tahun berhasil dimasukkan dalam situasi baru mengenai perbudakan oleh

*International Labour Organization* (ILO). ILO bersama dengan *Walkfree Foundation* dan *International Organization Migration* memperkirakan sekitar 40,3 juta orang dalam perbudakan, dimana 15,4 juta dari jumlah tersebut terjebak dalam pernikahan paksa yang dialami oleh perempuan dewasa dan anak-anak. Kasus ini yang melanda anak-anak jumlahnya belum berubah, meskipun secara sistematis menurun.

Sumber : *Anti Slavery International* (Anti Slavery Internasional) official : *International Organization Migration*

Mr. Aidin Mcquade selaku direktur *Anti Slavery International* menyatakan bahwa para pemimpin dunia harus mulai menerapkan kebijakan secara komprehensif untuk mengatasi perbudakan dan saatnya untuk memulai untuk melihat kasus ini sebagai hal yang sangat serius sebab mengakhiri pernikahan paksa sangat penting untuk memajukan dan mempromosikan hak-hak perempuan dan anak perempuan (Anti Slavery International , 2017).

### 3. 2. 2 Implementasi kasus berdasarkan konsep *Pressure Group*

#### 1) Isu Perbudakan Masuk Dalam Agenda PBB

Perbudakan masuk dalam tujuan *Sustainable Development Goals* 2015 berkat usaha *Anti Slavery International* yang tak pernah henti, khususnya ketika kasus ini menjadi agenda besar dunia internasional atas campur tangan Dr. Aidan McQuade. Kampanye panjang yang dilakukan oleh *Anti Slavery International* sejak tahun 2007 dan adanya situs web perbudakan Guardian pada tahun 2013 memberi peluang bagi usaha Dr. Aidan untuk terus mengajukan kasus perbudakan untuk diakui sebagai masalah pembangunan. Untuk setiap proyek pembangunan yang tidak mengenali hal ini dapat mengancam beberapa masalah kemiskinan yang tidak terselesaikan.

Perbudakan dapat terjadi pada seseorang dengan sengaja atau secara tidak terduga *excluded* dari pembangunan sosial, ekonomi, keadilan dan supremasi hukum menurut Dr. Aidan. Ini adalah masalah Hak Asasi Manusia dan politik. Moment saat kasus perbudakan mendapat pengakuan adalah ketika Paus Fransiskus membacakan isu pemberantasan perbudakan di depan umum konferensi yang diadakan di Vatikan. Setelah itu, pemerintah Inggris terutama Komisaris Anti-Perbudakanya yaitu Kevin Hyland, Jeffrey Sachs, penasihat Sekretaris Jendral PBB Ban Kyi Moon dan lainnya mendukung kasus ini dan membuat kasus ini menjadl hal yang serius (McQuade, 2015).



## 2) Seruan Anti Slavery International sampai ke Pemerintah Inggris

### Gambar 12 Identifikasi Perbudakan

Adanya perubahan positif terhadap cara pemerintah Inggris mengidentifikasi korban perbudakan terjadi berkat pengaruh kampanye *Anti Slavery International* yang mengajukan rekomendasi



perlindungan korban perbudakan. Langkah baru yang diumumkan oleh Sekretaris Dalam Negeri untuk meningkatkan *National Referral*

*Mechanism* (NRM) untuk mengidentifikasi dan menawarkan “harapan” untuk para korban perbudakan di seluruh Inggris adalah memisahkan keputusan tentang pemberian status korban perbudakan, meninjau semua keputusan negatif dan menciptakan sistem digital untuk mendukung NRM. Ini semua adalah seruan yang dikampanyekan oleh *Anti Slavery International* untuk melindungi korban perbudakan (*Anti Slavery International, 2017*).

Sumber : *Anti Slavery International (Anti Slavery International, 2017)* Positive Changes to the Way UK Identify Slavery Victims